

ABSTRAK

ADELINA HANDAYANI (01659210043)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *MOTION MARK* DI INDONESIA

(xiii + 149 halaman)

Merek merupakan bagian penting dari kegiatan perdagangan nasional maupun internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital banyak pelaku usaha yang menggunakan tipe merek baru yaitu *motion mark* atau merek bergerak. Merek audio visual seperti itu merupakan hasil imajinasi serta kreativitas manusia yang diaplikasikan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Adanya merek digital seperti itu mendorong perlunya mengkaji dan merevisi sistem hukum perlindungan merek yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan perlindungan *motion mark* di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan undang-undang. Hasil telaah peraturan perundang-undang dan Konvensi Internasional yang terkait dengan perlindungan merek dapat disimpulkan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek tidak mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap *motion mark* sebagai bagian dari merek. Itu berarti kedudukan dan keberadaan *motion mark* belum diakui oleh Undang-Undang Merek. Adanya kekosongan hukum tersebut menyebabkan tidak terfasilitasinya permohonan dan pendaftaran *motion mark* yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia segera merevisi Undang-Undang Merek guna memberikan kepastian hukum bagi perlindungan *motion mark*. Dengan demikian, Undang-Undang Merek dapat menjadi instrumen perdagangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, *Motion Mark*

Referensi: 59 (1961 – 2022)

ABSTRACT

ADELINA HANDAYANI (01659210043)

LEGAL PROTECTION FOR MOTION MARKS IN INDONESIA

(xiii + 149 pages)

Marks are an essential part of national and international trade activities. Along with the development of digital technology, many business actors are using a new type of mark, namely the "motion mark" or "moving mark." Such audio-visual marks are the result of human imagination and creativity, which are applied in the activities of trading goods and services. The existence of such digital marks encourages the need to review and revise the applicable legal system of trademark protection. This study examines the regulation and implementation of motion mark protection in Indonesia using normative juridical methods and legal approaches. The results of the study of laws and regulations and international conventions related to marks protection can be concluded that Article 1 point 1 of the Trademark Law does not regulate the recognition and protection of motion marks as part of a mark. This means that the Trademark Law has not recognized the position and existence of the motion mark. A legal vacuum causes the application and registration of the motion mark not to be facilitated, resulting in the absence of legal certainty. Therefore, it is recommended that Indonesia immediately revise the Trademark Law to provide legal certainty for motion mark protection. Thus, the Trademark Law can become a trading instrument following technological developments and economic dynamics.

Keywords: Legal Protection, Mark, Motion Mark.

Reference: 59 (1961 – 2022)